

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Maryani, (2019, hlm. 8). Simon dalam Widjajanti, (2011, hlm. 16) menyebutkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu aktivitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (self-determination). Alfitri dalam Habib, (2021, hlm. 84) Pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat (*people centered*) (Muslim, 2007). Percy-Okunia dalam Rahman (2016, hlm. 193) Sintesis antara pemberdayaan dan partisipasi akhirnya menghasilkan pengertian: “...*what gives real meaning to (popular) participation is the collective by the people concerned to pool their efforts and whatever other resources they decide to pool together, to attain objectives they set for themselves. In this regard participation is viewed as an active process in which the participants take 7 initiatives and action that is stimulated by their own thinking and deliberations and over which only involves the people in actions that have been thought out or designed by others and are controlled by others is unacceptable*” Hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan dan partisipasi memiliki keterkaitan yang kuat. Pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan Craig and Mayo dalam Rahman, (2016, hlm. 193) yang menegaskan “*empowerment is road to participation*” *Empowerment* atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah

konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat terutama Eropa. Untuk memahami konsep empowerment secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005:57). Pemberdayaan menurut (Suhendra, 2006:74-75) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”. Selanjutnya pemberdayaan menurut Jim Ife (dari buku Suhendra, 2006:77) adalah “meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (empowerment aims to increase the power of disadvantage)”. Menurut (Moh. Ali Aziz dkk, 2005: 169) pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (breakdown) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain. Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya. (Tantan Hermansyah dkk, 2009:31).

Mengutip buku Pemberdayaan Masyarakat tulisan Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019: 8), pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Menurut suhendra (2006) Pemberdayaan adalah bagian daripada adanya kegiatan yang berkesinambungan,

dinamis, dan secara sinergis mendorong keterlibatan seluruh potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan seluruh potensi.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat bisa mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. (Widjaja, 2003).

Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut: a. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan atau dikesampingkan. b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Menurut (Widjaja, 2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. (Abu Huraerah, 2008:87) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah

tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

2.1.1.2 Pendekatan Pemberdayaan

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat diformulasikan dengan mengacu kepada landasan filosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan, yaitu:

- a. Pendekatan Partisipatif, dalam arti selalu menempatkan masyarakat sebagai titik pusat pelaksanaan pemberdayaan. Pemberdayaan selalu bertujuan untuk pemecahan masalah masyarakat, bukan untuk mencapai tujuan-tujuan orang luar atau penguasa, metode atau teknik pemberdayaan maupun teknologi yang ditawarkan harus berbasis pilihan masyarakat sampai pada ukuran keberhasilan pemberdayaan berdasarkan ukuran-ukuran masyarakat sebagai penerima manfaatnya.
- b. Pendekatan kesejahteraan, dalam arti apapun kegiatan yang akan dilakukan, sumberdaya, teknologi serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat harus memberikan manfaat terhadap perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat penerima manfaatnya.
- c. Pendekatan pembangunan berkelanjutan, dalam arti bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terjamin keberlanjutannya. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu menyiapkan masyarakat penerima manfaatnya agar pada suatu saat mereka akan mampu mandiri untuk melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai proses pembangunan yang berkelanjutan Handini, (2019, hlm. 71).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

- a. Upaya itu harus terarah (targeted). Ini yang secara populer disebut pemihakan, yang ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

- b. Pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya. Mengikutsertakan masyarakat yang menjadi penerima manfaat mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya; Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Sehingga pendekatan kelompok paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien (Sujarwo, 2021)

2.1.1.3 Prinsip Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan proses yang panjang, untuk itu diperlukan adanya konsistensi agar tujuannya mampu menjadi upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia. Konsistensi dalam pemberdayaan menjadi aspek penunjang utama agar tujuan dari rencana awal pemberdayaan dapat terwujud secara tepat. Menurut Anwas (2014, hlm. 58-59), pemberdayaan harus membantu meningkatkan kualitas hidup subjek, berdaya saing dan mandiri. Dalam melakukan pemberdayaan, pelaku pemberdayaan harus berpegang pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Prinsip ini kemudian diterapkan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan hakikat dan konsep pemberdayaan, dapat diidentifikasi beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- a. Pemberdayaan dilakukan secara demokratis serta menghindari unsur paksaan. Semua individu memiliki hak yang sama untuk diberdayakan.
- b. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi tujuan.
- c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau subjek kegiatan pemberdayaan.

- d. Singkatnya pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai-nilai, budaya, dan kearifan daerah yang memiliki nilai luhur di dalam masyarakat.
- e. Pemberdayaan merupakan proses yang memakan waktu, sehingga merupakan proses yang bertahap dan berkesinambungan.
- f. Kegiatan pendampingan atau coaching perlu dilakukan secara cerdas, bertahap, dan berkesinambungan.
- g. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari satu sisi. Ia harus holistic dalam setiap aspek kehidupan sosial.
- h. Perempuan khususnya remaja dan ibu muda perlu diberdayakan karena memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan.
- i. Pemberdayaan dilakukan untuk membantu masyarakat terus belajar dan mengembangkan kebiasaan belajar sepanjang hayat.
- j. Pemberdayaan perlu memperhatikan keragaman budaya. Oleh karena itu diperlukan metode dan pendekatan yang berbeda sesuai dengan situasi di lapangan.
- k. Pemberdayaan bertujuan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat.
- l. Tujuan pemberdayaan harus dipromosikan oleh kewirausahaan dalam persiapan untuk wirausaha.
- m. Agen pemberdayaan perlu memiliki keterampilan (komptensi) yang cukup, dinamisme, fleksibilitas perilaku, dan kemampuan yang memadai untuk mengikuti tuntutan zaman dan masyarakat. Agen pemberdayaan bertindak sebagai fasilitator.
- n. Pemberdayaan membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang ada dan terhubung di masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, LSM, dan anggota masyarakat lainnya. Setiap orang yang terlibat dilibatkan sesuai dengan peran, potensi, dan keterampilannya.

2.1.1.4 Karakteristik Pemberdayaan

Masyarakat Menurut Kamil dalam Hidayat (2018, hlm. 24), ada empat bagian karakteristik dasar dalam proses pemberdayaan masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan pendidikan masyarakat. Karakteristik tersebut meliputi:

- a. Pengorganisasian masyarakat, ialah karakteristik yang mengarah pada tujuan untuk mengaktifkan masyarakat dalam usaha meningkatkan dan mengubah keadaan sosial ekonomi mereka. Pencapaian tujuan tersebut kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat diorganisir semaksimal mungkin agar mereka aktif berpartisipasi dalam mengembangkan kemampuan dan kerja keras untuk mencapai tujuan pembangunan.
- b. Kolaborasi dan pengelolaan diri, yaitu pendekatan dengan sistem penyamarataan atau pembagian wewenang di dalam hubungan kerja atau di dalam kegiatan. Karena itu perlu ada struktur organisasi yang mendukung dan memperkecil adanya perbedaan status, serta adanya pembagian peranan. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: (1) Peranan partisipan menerima tanggung jawab dalam kegiatan; menyumbang ide-ide atau gagasan melalui wakil-wakilnya dan ikut mengontrol jalannya kegiatan; (2) Peranan agen pembaharu, yaitu mengkoordinasikan kegiatan sebagai fasilitator dan narasumber; (3) Metode dan proses melakukan kegiatan belajar dengan teman, dan pengambilan keputusan secara mufakat dan adanya kepanitiaan dalam kegiatan.
- c. Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada keterlibatan setiap anggota (warga belajar) dalam keseluruhan kegiatan, perlunya melibatkan para pemimpin serta tenaga-tenaga ahli setempat. Agen dalam kegiatan ini berperan sebagai fasilitator, pembimbing, sumber belajar, penghubung dengan sumber luar, serta memberikan latihan sesuai dengan kebutuhan. Metode dan proses yang ditempuh mengutamakan perasaan, mencari bahan dan merencanakan kegiatan secara bersama-sama, serta belajar dari pengalaman.
- d. Pendekatan yang menekankan pada terciptanya situasi yang memungkinkan warga belajar tumbuh dan berkembang analisisnya serta memiliki motivasi untuk ikut berperan. Agar situasi tersebut dapat terwujud peranan agen

adalah mengajukan permasalahan, merangsang adanya pertanyaan dan menciptakan suasana kebebasan yang bertanggung jawab.

2.1.1.5 Model-Model Pemberdayaan

Menurut Jack Rothman dalam Harahap (2020, hlm. 200-201) ada tiga model kegiatan pemberdayaan yaitu:

a. Pemberdayaan masyarakat lokal

Pemberdayaan masyarakat lokal merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah kemajuan ekonomi dan sosial melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat. Model ini juga memandang masyarakat memiliki potensi yang terpendam yang perlu dibangkitkan.

b. Perencanaann sosial

Model ini bertujuan untuk memecahkan sebuah masalah sosial yang ada dalam masyarakat serta untuk menentukan keputusan seperti dalam mengatasi masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pengangguran, dan lain-lain.

c. Aksi sosial

Aksi sosial memiliki tujuan dan sasaran perubahan fundamental dalam sebuah organisasi/lembaga dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan, sumber, pengambilan keputusan. Model ini didasarkan kepada pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang sering menjadi korban ketidakadilan dari struktur sosial masyarakat. Kemiskinan, ketidakberdayaan, kelemahan ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh kelompok elit yang berkuasa, maka dari itu aksi sosial ini orientasinya pada proses dan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan, dan tindakan-tindakan aktual untuk merubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan.

2.1.1.6 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang harus memiliki tujuan yang jelas, oleh karena itu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perlu dilandasi strategi tertentu untuk mencapai keberhasilan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Menurut Mardikanto (2017, hlm. 168) strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu:

- a. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat.
- c. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk didalamnya) kesehatan, budaya, dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Menurut Suharto dalam Hayati, (2016, hlm. 4), pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat.
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri yang menunjang kemampuan dan kepercayaan diri yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan: pemeliharaan kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antar berbagai kelompok dalam

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

2.1.1.7 Indikator Keberdayaan

Untuk mengetahui tujuan dari pemberdayaan masyarakat, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan berdaya tidaknya individu atau kelompok. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat dikonsentrasikan pada beberapa 13 aspek yang dibutuhkan agar sesuai dengan sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto, (2005, hlm. 63) mengembangkan delapan indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai Empowerment Index atau Indes pemberdayaan, meliputi:

- a. Kebebasan mobilitas: Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau keluar wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: Kemampuan individu untuk membeli barang-barang (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu) kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, shampoo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar: Kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalan, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, point tinggi diberikan individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga. Mampu membuat kepusan secara sendiri maupun bersama suami atau istri mengenai keputusankeputusan keluarga.

- e. Kebebasan relatif dan dominasi keluarga.
- f. Kesadaran hukum dan politik.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: Seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes misalnya terhadap kekerasan dalam rumah tangga, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: Memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dan pasangannya.

Menurut Suharto dalam Hayati, (2016, hlm. 4), pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat.
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri yang menunjang kemampuan dan kepercayaan diri yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan

terpinggirkan.

- e. Pemeliharaan: pemeliharaan kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

2.1.2 Ekowisata / Desa Wisata

2.1.2.1 Definisi Desa Wisata/ Ekowisata

Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian, serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai keterampilan dan kemampuan masing-masing, memberdayakan potensi secara kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di wilayahnya.

Desa wisata menempatkan komunitas atau masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan, kemudian memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam aktivitas sosialnya, kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan; mewadahi peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di wilayahnya; meningkatkan nilai kepariwisataan serta memberdayakannya bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pelaku utama, komunitas atau masyarakat berupaya meningkatkan potensi pariwisata atau daya tarik wisata yang ada di wilayahnya. Selanjutnya, komunitas atau masyarakat menyiapkan diri sebagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan ketika berkunjung. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komunitas atau masyarakat di desa wisata, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendayagunakan aset dan potensi yang dimiliki.

Ekowisata/ desa wisata ini adalah sebuah langkah yang pasti untuk lebih masuk ke Kawasan Masyarakat kecil sebagaimana dalam pengertian pariwisata. Pengembangan pariwisata ditujukan untuk memperkenalkan, melestarikan,

memanfaatkan, serta meningkatkan kualitas wisata, seperti menurut Pearce (1981) dalam (Chaerunissa & Yuniningsih, 2020 hlm 6) bahwa pengembangan pariwisata adalah kegiatan guna menambah dan meningkatkan sarana maupun pelayanan yang diperlukan oleh pengunjung. Dalam pembangunan wisata tentunya dilakukan dengan memperhatikan kelestarian budaya, kelestarian lingkungan, kelangsungan wisata serta dampak bagi masyarakat. Mempunyai kekuatan penggerak ekonomi yang luas, bukan hanya terkait kunjungan wisata saja, tetapi yang lebih utamanya ialah pengembangan wisata dapat membangun semangat masyarakat, mengapresiasi kekayaan alam, budaya yang dimiliki serta membangun kesejahteraan masyarakat. Proses pengelolaan wisata dilaksanakan dengan saling bekerjasama antar pemerintah dan masyarakat karena satu sama lain saling memiliki ketergantungan untuk mewujudkan suatu tujuan. Pengelolaan wisata yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak lain adalah sebagai upaya guna meningkatkan kualitas serta menciptakan kesejahteraan pada masyarakat, karena tujuan dari pengembangan wisata ini adalah masyarakat itu sendiri. Menurut Sumarto (2003) dalam (Armela Shintani, 2021 hlm 30) bahwa dalam pengelolaan destinasi wisata ada tiga aktor penting: 1. Pemerintah sebagai fasilitator pada pengelolaan wisata 2. Swasta selaku penyedia dan penyelenggara jasa dan 3. Masyarakat ikut serta dalam pengelolaan wisata. Dengan begitu pariwisata bisa dikatakan menuju ke sektor yang luas maka ekowisata ini menuju ke kawasan yang lebih kecil untuk lebih memberikan bukti nyata dari sebuah gagasan yang di usung yakni memanfaatkan Kawasan yang berpotensi untuk menjadi ekowisata yang meningkatkan ekonomi.

2.1.2.2 Konsep Pengembangan Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, 1993). Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari penduduk suatu wilayah terbatas yang dapat saling berinteraksi secara langsung di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian, serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai keterampilan dan kemampuan masing-masing, memberdayakan potensi secara kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di wilayahnya.

Desa wisata menempatkan komunitas atau masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan, kemudian memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam aktivitas sosialnya, kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, mewadahi peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di wilayahnya, meningkatkan nilai kepariwisataan serta memberdayakannya bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai pelaku utama, komunitas atau masyarakat berupaya meningkatkan potensi pariwisata atau daya tarik wisata yang ada di wilayahnya. Selanjutnya, komunitas atau masyarakat menyiapkan diri sebagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan ketika berkunjung. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komunitas atau masyarakat di desa wisata, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendayagunakan aset dan potensi yang dimiliki (Ensiklo, 2019) Untuk menguji kesiapan suatu desa menjadi desa wisata, diperlukan beberapa aspek yang harus diperhatikan. Beberapa aspek tersebut apakah sudah dimiliki oleh suatu desa yang akan menjadi desa wisata. Beberapa aspek berikut ini sebagai langkah strategis dalam mengembangkan potensi desa menjadi desa wisata (Berdesa, 2015) yaitu: 1) Mengidentifikasi potensi desa dengan cara bermusyawarah dan berdiskusi bersama seluruh komponen desa dari semua kalangan, untuk membahas potensi desa yang dapat dibentuk menjadi komoditas yang dipandang dari segala aspek, dapat berupa keindahan alam, hasil bumi, kekayaan flora fauna/hayati, adat dan budaya / sosio kultural, masyarakat, tradisi atau hal-hal yang bersifat khas/unik yang tidak dimiliki pada daerah lain. Mengidentifikasi potensi unggulan yang dimiliki oleh desa agar dapat dijadikan komoditas utama. 2) Mengidentifikasi permasalahan yang menjadi penghambat dalam pengembangan potensi wisata desa, dari sudut pandang hal hal yang bersifat fisik, non fisik atau sosial, internal dan eksternal, atau dapat juga dari permasalahan yang ada, dipandang sebagai tantangan yang jika di olah dan dikembangkan dengan cara tertentu dapat menjadi potensi desa wisata. 3) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk menyamakan pendapat, persepsi dan mengangkat potensi desa guna dijadikan desa wisata. Komitmen ini yang menjadi dukungan terkuat bagi terwujudnya dan keberlangsungan desa

wisata. 4) Mengidentifikasi dampak yang terjadi bagi pengembangan desa wisata baik dampak positif maupun negatif dari sebuah kegiatan wisata, sesuai dengan keunikan masing-masing desa. Masing-masing desa memiliki karakteristik sendiri akan menghasilkan dampak yang berbeda satu sama lain terutama adanya perubahan adat dan budaya / sosial kultural. 5) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk menggandeng Pemerintah Daerah dan jika perlu menggandeng pihak swasta. Hal yang perlu dilakukan juga adalah menganalisa dan mengidentifikasi dampak jika bekerja sama dengan pihak swasta, termasuk untuk penganggaran guna pembangunan desa wisata dengan menggunakan seluruh sumber daya ekonomi yang ada. 6) Desa memiliki kesiapan segala perangkat aturan / regulasi norma yang lebih bertujuan untuk mengawal pengembangan desa wisata dan mengawasi potensipotensi penyimpangan yang mungkin saja dapat terjadi. Regulasi disiapkan agar berjalannya aktivitas wisata beserta dampaknya tetap berada dalam koridor regulasi sebagai payung hukumnya. 7) Adanya pelatihan-pelatihan bagi seluruh komponen desa, termasuk pemerintah desa tentang manajemen pariwisata berbasis manajemen modern yang didukung dengan teknologi informasi di era teknologi 4.0, bagaimana mengelola tempat wisata, manajemen tamu/pengunjung, beserta inovasi-inovasi yang perlu dikembangkan dengan sentuhan teknologi yang dapat memberikan nilai lebih / addedvalue bagi desa wisata, untuk selalu berinovasi dan berkembang seiring berkembangnya teknologi yang selalu memberikan sesuatu yang baru bagi wisatawan nantinya. 8) Memanfaatkan media cetak, elektronik atau media sosial untuk memperkenalkan dan mempublikasikan potensi wisata di desa, seperti perkembangan teknologi saat ini yang sangat berkembang dengan memanfaatkan media internet. Internet kini menjadi sarana publikasi yang sangat efektif yang menjangkau tanpa batas jarak waktu dan tempat, destinasi wisata yang lokasinya terpencil pun dapat diketahui oleh masyarakat dunia. 9) Belajar pada kesuksesan desa wisata lain atau melakukan studi banding. Desa wisata dapat belajar banyak dari keberhasilan desa wisata lain khususnya yang sejenis, karena permasalahan dan tantangan masa depan yang bakal dihadapi, kurang lebih sama dan tidak banyak berbeda, hanya melalui manajemen

profesional dan inovatif, desa wisata akan eksis dan kompetitif melalui ujian yang bersifat internal, eksternal maupun regional internasional.

2.1.2.3 Tujuan Desa Wisata

Tujuan dari pembentukan desa wisata ini adalah untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai pelaku penting dalam pembangunan sektor pariwisata dan dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah membangun dan menumbuhkan sikap dukungan positif dari masyarakat desa sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sapta pesona bagi tumbuh.

2.1.2.4 Fungsi Desa Wisata

Mengutip dari digitaldesa (2019) Fungsi desa wisata merupakan sebagai wadah langsung bagi masyarakat akan kesadaran adanya potensi tempat sebagai tempat wisata. Tiga Komponen yang perlu diperhatikan sebelum membangun desa wisata:

1. Kondisi desa Sekarang

Untuk mengetahui potensi wisata desa yang ada, maka pihak desa harus memiliki basis data yang jelas mengenai lahan, lokasi, daerah serta bagaimana ekosistem yang dapat membantu lokasi wisata nantinya. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan, seperti pengumpulan data dan Kerjasama dengan berbagai pihak ketiga.

2. Keadaan Masyarakat dan Struktur Organisasi

Desa wisata akan sangat berkembang jika dikelola oleh desa sendiri, kebutuhan akan organisasi yang khusus mengurus desa wisata dibutuhkan agar berkelanjutan serta ada pihak yang menentukan arah desa wisata.

3. Konsep Desa Wisata yang unik

Konsep atau ide desa wisata menjadi ujung tombak pembeda antara wisata lain di daerah lain. Pembentukan konsep desa wisata ini dapat semakin tajam jika dipadukan dengan pemetaan wilayah yang dilakukan di awal.

2.1.2.5 Komponen Desa Wisata

a. Kondisi desa

Untuk mengetahui potensi wisata, pihak desa perlu memiliki basis data yang jelas mengenai kondisi desa dan bagaimana ekosistem yang dapat mendukung lokasi wisata nantinya.

b. Keadaan masyarakat dan struktur organisasi

Dalam pengembangannya, desa wisata diharapkan dapat dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri. Penyusunan organisasi untuk mengelola desa wisata dan kesiapan masyarakat dalam mengelola desa sangat diperlukan agar desa wisata dapat berkembang dengan optimal

c. Konsep desa wisata yang unik

Konsep desa wisata yang unik akan memberikan penilaian yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain.

Masyarakat dapat berklembang dengan melakukan sebuah instansi yang bergerak di ekowisata untuk mengnambangkan daerah setempat menajdi lahan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

2.1.3 Ekonomi

2.1.3.1 Definisi Ekonomi

Menurut Abraham Maslow , ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang berusaha menyelesaikan masalah asas kehidupan manusia dengan cara mempersatukan segala sumber ekonomi yang ada berdasarkan teori serta prinsip ekonomi yang dinilai efektif dan efisien. Aristoteles Dilansir dari buku *Formulai Kebijakan Ekonomi Bangkit* (2022) karya Dewa Gede Sudika Mangku dkk, berikut pengertian ilmu ekonomi menurut Aristoteles: "Ekonomi adalah cabang ilmu yang bisa digunakan lewat dua jalan, yakni kemungkinan untuk dipakai, dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang." Ibnu Kaldun (ibid, 65) Sejarawan muslim dari Tunisia yang juga dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi dan ekonomi ini menyebut ekonomi sebagai ilmu yang positif dan normatif. Selain untuk memenuhi kebutuhan, mempelajari ekonomi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Ilmu ekonomi dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekonomi deskriptif dan teori ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi:

1. Ilmu ekonomi deskriptif

Ilmu ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang digunakan untuk mengumpulkan keterangan nyata dan relevan dengan masalah ekonomi. Data tersebut berupa angka dan statistik.

2. Teori ekonomi

Teori ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas untuk menyusun model analisis ekonomi untuk menjelaskan garis besar perilaku sistem perekonomian. Teori ekonomi bermanfaat untuk menetapkan kebijakan ekonomi atau bagi pengamat ekonomi.

Ruang lingkup teori ekonomi meliputi 1) ekonomi makro, yakni mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan, 2) ekonomi mikro, yakni mempelajari perilaku perekonomian secara individual seperti rumah tangga produsen atau konsumen, dan 3) ekonomi terapan, yakni diterapkan dalam kehidupan nyata.

Selain dibagi menjadi dua, ilmu ekonomi juga memiliki delapan cabang. Berikut penjelasan lengkapnya Cabang ilmu ekonomi:

1. Ilmu ekonomi moneter

Ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya.

2. Ilmu ekonomi publik

Ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian.

3. Ilmu ekonomi industri

Ilmu ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang fokus membahas tentang interaksi berbagai perusahaan dalam industri.

4. Ilmu ekonomi internasional

Ilmu ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar negara.

5. Ilmu ekonomi regional

Ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah.

6. Ilmu ekonomi SDA

Ilmu ekonomi SDA adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi.

7. Ilmu ekonomi SDM

Ilmu ekonomi SDM adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang faktor produksi tenaga kerja yakni mencakup sumber daya manusia.

8. Ilmu ekonomi syariah

Ilmu ekonomi syariah adalah cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menerapkan ekonomi syariah berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Dalam perkembangannya, cabang ilmu ekonomi tersebut melahirkan ilmu baru. Misalnya manajemen perusahaan, pemasaran, akuntansi, ilmu ekonomi neraca, hingga ilmu hitung keuangan perusahaan.

Teori pertumbuhan Ekonomi terbagi menjadi 2 yakni :

- Teori Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik beranggapan bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Adam Smith Filsuf dan ahli ekonomi ini merumuskan teorinya dalam buku berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Dalam buku tersebut, Adam Smith mengatakan pertumbuhan ekonomi bertumpu pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output dan hasil. David Ricardo merumuskan teori ini dalam buku berjudul *The Principles of Political and Taxation*. Bertolak belakang dengan pendapat Adam Smith sebelumnya, menurutnya pertumbuhan penduduk yang besar dapat berdampak pada kelebihan tenaga kerja sehingga upah yang diberikan akan menurun. Sementara upah tersebut nantinya digunakan untuk membiayai taraf hidup

minimum pekerja sehingga kondisi ekonomi akan mengalami kemandegan atau stationary state.

- Teori Neo Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik menjelaskan faktor pertumbuhan ekonomi negara dapat stabil dengan tiga komponen penting yaitu tenaga kerja, modal dan teknologi. Menurut Joseph Schumpeter, ekonomi suatu negara dapat meningkat jika pengusaha menciptakan inovasi dan membuat kombinasi baru terkait proses produksi hingga investasi bisnisnya. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Robert M. Solow lebih menekankan pada rangkaian kegiatan produksi yang dilakukan manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Menurutnya, pertumbuhan penduduk bisa berdampak positif dan negatif, maka kondisi tersebut harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang produktif.

Ekonomi mikro dan makro adalah dua jenis klasifikasi dasar dalam kategori ruang lingkungannya pada ilmu ekonomi. Sesuai dengan namanya, mikro identik dengan suatu hal yang kecil dan sebaliknya makro diidentikan dengan hal yang besar.

Menurut Paulus Kurniawan dalam bukunya Pengantar Ekonomi Mikro & Makro yang diterbitkan 2015 lalu, pengertian ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengkaji interaksi individu dalam memproduksi dan mengkonsumsi produk dalam perusahaan. Sedangkan ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari secara keseluruhan. Ekonomi mikro dan makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang paling mendasar dalam pemahaman bidang ekonomi. Perbedaan keduanya ada pada lingkup yang dikaji, yaitu mikro secara lebih sempit dan makro lebih luas. Perbedaan Ekonomi Mikro & Makro dalam bidang ekonomi terdapat dua klasifikasi cabang ilmu yang paling dasar, yaitu ekonomi mikro dan makro. Kedua cabang ilmu tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan. Meskipun saling berkaitan, namun keduanya juga terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan ekonomi mikro dan makro antara lain sebagai berikut.

1. Ruang Lingkup

Seturut dengan namanya, mikro dan makro memiliki pengertian yang berbeda. Mikro yang berarti kecil atau sempit, dalam hal ini ekonomi mikro juga hanya mengkaji ilmu ekonomi di ruang lingkup yang lebih kecil. Dikutip dari artikel berjudul Uji Normalitas Data Omzet Bulanan Pelaku Ekonomi Mikro Desa Senggigi dengan Menggunakan Skewness dan Kurtosi oleh Dodi Fahmeyzan, tahun 2018, yang juga menyatakan bahwa ruang lingkup ekonomi mikro hanya terbatas dan sifatnya dalam ilmu ekonomi adalah lebih khusus. Biasanya yang menjadi ruang lingkup ekonomi mikro adalah seperti perusahaan atau industri. Sedangkan ekonomi makro memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan ekonomi mikro, sesuai dengan namanya yang lingkungannya lebih besar atau luas. Ekonomi makro membahas masalah ekonomi dengan lingkup lebih luas tidak hanya tentang perusahaan atau industri, tetapi keseluruhan aspek di perekonomian.

2. Teori

Dilansir dari artikel ekonomi berjudul Pengertian dan Penjelasan Tentang Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro karya Anugrah Dwi, tahun 2023, dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, teori mikro dan makro juga terdapat perbedaan.

Ekonomi mikro teorinya mengkaji atau membahas mengenai antara lain: teori harga, teori produksi, teori pasar. Ekonomi makro teorinya membahas mengenai kebijakan ekonomi yaitu: fiskal dan moneter serta kebijakan yang lebih luas, seperti hubungan kebijakan ekonomi dengan faktor lain yakni bidang sosial, hukum, budaya, politik, dan sebagainya.

3. Pembahasan

Berdasarkan sumber yang sama pula, dalam ekonomi mikro topik yang menjadi pembahasan adalah terkait aspek ekonomi secara terkhusus. Pembahasan tersebut seperti hubungan produsen dan konsumen, kenaikan harga, penawaran, dan sebagainya.

Berbeda dengan pembahasan ekonomi makro yang mencakup masalah ekonomi secara lebih luas, seperti masalah pengangguran, inflasi, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan masih banyak lagi.

2.1.3.2 Prinsip Ekonomi

Yopi nadia, (2013). Prinsip ekonomi memiliki 3 prinsip yaitu:

- a. Produksi Kegiatan produksi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari hasil produksi akan melahirkan suatu produk. Produk inilah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Tujuan produksi, antara lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, menghasilkan barang setengah jadi untuk keperluan produksi selanjutnya, turut meningkatkan kemakmuran rakyat, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan sumber devisa negara dengan produksi barang ekspor, dan masih banyak lagi. Beberapa faktor yang memengaruhi produksi, di antaranya Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sumber Daya Modal.
- b. Distribusi Distribusi dapat disimpulkan sebagai kegiatan menyebarkan produk baik berupa barang maupun jasa ke seluruh pasar. Proses distribusi mempertemukan produk maupun jasa hasil produksi kepada para konsumen. Distribusi punya peranan penting dalam hal menyediakan kebutuhan manusia.
- c. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa. Bagi para pegiat ekonomi, prinsip konsumen sering kali di jadikan sebagai indicator dari perekonomian secara menyeluruh. Prinsip ini juga disebut sebagai tujuan akhir dari suatu kegiatan.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Panji Ilhami Zulfa, 2021 dengan judul identifikasi potensi ekowisata di desa seruni mumbul kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok timur. Hasil dari penelitian tersebut adalah kawasan yang berpotensi untuk di jadikan wisata dikarenakan lokasi dan keadaan setempat yang banyak tanaman mangrove sangat strategis.

Selain itu peneliti menyebutkan bahwa kesempatan dengan beradanya kawasan ini di Nusa Tenggara Barat yang basis nya menjadi tujuan wisatawan lokal maupun manca negara untuk berwisata. Maka dengan begitu kawasan mangrove ini di jadikan sebuah kawasan ekowisata untuk meningkatkan strata ekonomi masyarakat setempat dalam mencari atau memberikan sebuah mata pencaharian.

Selain bertumpu pada sektor laut, Desa Seruni Mumbul memiliki potensi-potensi yang eksotis yang potensial dikembangkan sebagai kawasan ekowisata diantaranya yaitu alam, budaya dan buatan. Wisata alam yang terdapat di Desa Seruni Mumbul berupa kawasan mangrove, pengembangan kawasan mangrove sebagai Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) selain bisa meningkatkan prekonomian masyarakat juga membawa dampak positif terhadap penataan lingkungan karena tidak terpisahkan dari konservasi alam. Kawasan mangrove yang terdapat di Desa Seruni Mumbul seluas 1,05 Ha yang terhubung dengan sebuah teluk kecil dan membentang hingga ke bibir pantai, namun 5 Ha dari luas mangrove sudah rusak karena sebagian masyarakat biasa menggunakan kayu dari mangrove sebagai bahan bakar sehingga pemerintah Desa Seruni Mumbul berencana melakukan pengelolaan dan penanaman kembali untuk menghindari kerusakan yang lebih luas. Sedangkan potensi wisata buatan yang terdapat di Desa Seruni Mumbul merupakan sebuah objek wisata yang saat ini lagi tren dikalangan wisatawan dan biasa disebut oleh masyarakat sebagai Objek Wisata Denda Seruni Mumbul.

Denda Seruni merupakan objek wisata buatan yang dibangun pada tahun 2019 dan diresmikan pada 5 juni 2019, kawasan tersebut adalah rawa-rawa pada sebuah teluk kecil atau biasa disebut oleh masyarakat Seruni Mumbul dengan sebutan menanga, kawasan yang jika di lihat dari peta citra berbentuk air laut yang menjorong memanjang ke daratan dengan kondisi air yang tampak tenang dan dipoles sentuhan kreativitas sehingga kini telah menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. Selain menawarkan jenis wisata pedesaan yang masih terlihat alami, kawasan wisata Dende Seruni

dipoles dengan konsep swafoto dan menghadirkan banyak objek foto dan aktifitas wisata sebagai daya tarik yang bisa dimanfaatkan oleh wisatawan dengan memotret diri sendiri untuk diunggah ke sosial media seperti menara eiffel, rumah pohon, balon udara, canoing dll

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Lestari, 2022 dengan judul strategi pengembangan ekowisata bendungan tirta shinta dalam meningkatkan minat wisatawan. Di kabupaten Lampung Utara terdapat beragam objek wisata, mulai dari wisata alam, wisata buatan, agrowisata dan juga ekowisata, salah satunya adalah Bendungan Tirta Shinta yang berada di desa Wonomarto yang mana pengembangan wisata memiliki tujuan untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Ekowisata Bendungan Tirta Shinta didirikan pada tahun 2016, yang di kelola oleh pengelola dan masyarakat yang tergabung dalam BUMDes Swadaya Artha Mandiri. Awal diresmikannya terdapat beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang di antaranya gazebo, toilet, panggung, spot foto, perahu, bebek-bebekan, odong-odong, pulau selfia apung, wahana outbond serta lahan parkir kendaraan wisatawan. Untuk menambah minat dari wisatawan peneliti menyebutkan bahwa sudah dilakukan dengan meningkatkan keamanan yang di lakukan oleh pengelola setempat, pembagusan beberapa fasilitas , juga kebersihan yang di jaga.
3. Penelitian yang di lakukan oleh Arya Citra Dewi, 2023 dengan judul analisis pengelolaan ekowisata pantai bohay dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa binor kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Ekowisata merupakan konsep wisata alami berbasis konservasi alam yang keberadaanya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Pemberdayaan lingkungan berbasis pariwisata disebut juga sebagai ekowisata. Seperti Ekowisata Pantai Bohay yang merupakan wisata pantai dilengkapi Café dan resto yang memiliki konsep ekowisata. Usaha ini dikelola oleh desa dan merupakan badan usaha milik BUMDes yang banyak mengalami perkembangan dalam 5 tahun terakhir , Serta keberadaannya

memberikan dampak positif bagi Desa Binor dan perekonomian masyarakat lokal. Untuk mengetahui pengelolaan Ekowisata Pantai Bohay, Untuk mengetahui bagaimana upaya Ekowisata Pantai Bohay dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Ekowisata Pantai Bohay. Pengelolaan Ekowisata Pantai Bohay dijalankan dengan manajemen terpisah dari Desa dengan organisasi terstruktur yang telah diatur dan bertanggung jawab atas peran masing-masing melalui beberapa segmen yaitu HO/manajemen pusat, manajer, tim office dan processing, Upaya Pantai Bohay dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal adalah bermitra dengan UMKM lokal, selain itu mengambil bahan baku café dan restoran berupa sayur/rimpangan maupun seafood yang berasal dari penduduk setempat, kemudian karyawan yang bekerja di café dan restoran Pantai Bohay adalah penduduk lokal. Kendala yang dihadapi oleh Ekowisata Pantai Bohay adalah mengenai anggaran dana pengembangan yang terbatas, serta terkendala sumber daya manusia.

4. Penelitian oleh Eva Rachmawati tahun 2022 yang berjudul “PERAN BUDAYA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS PENGEMBANGAN WISATA”, penelitian ini menganalisis pengaruh budaya terhadap proses pemberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan pariwisata dipengaruhi budaya masyarakat dimana program tersebut dilaksanakan. Masyarakat Indonesia memiliki adat, budaya dan tradisi yang berbeda-beda, masing-masing dengan ciri khas serta karakter tersendiri. Hal ini harus dilakukan agar kebijakan atau peraturan yang diterapkan perlu memperhatikan kepentingan seluruh kelompok masyarakat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
5. Penelitian oleh M. Rizal Nur Afif dan Widya Nusantara tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul “MODEL PEMBERDAYAAN PEMUDA DALAM KOMUNITAS KUDA LUMPING DI SANGGAR PERMADI MELATI MOJO KEDIRI”. Penelitian ini membahas mengenai potensi

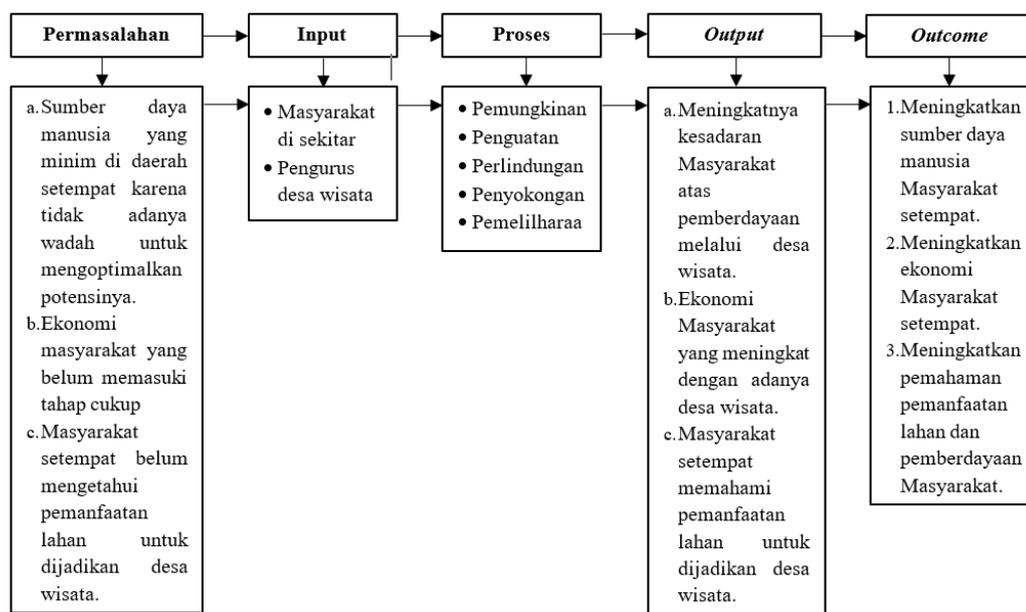
pemuda yang berperan dalam pembangunan. Model pemberdayaan dalam komunitas Kuda Lumping ini yaitu hiburan, media pendidikan, tempat komunikasi, dan mampu melestarikan kesenian sehingga menciptakan pemuda yang aktif dan kreatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tujuannya untuk menganalisis dan menjelaskan model pemberdayaan pemuda dalam komunitas.

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2017, hlm. 283), kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting, kerangka berpikir merupakan alat berpikir peneliti dalam penelitian. Dengan adanya kerangka konseptual ini diharapkan bisa membawa desa menjadi lebih baik dengan meningkatkan ekonomi masyarakat tersebut, bahkan dengan tingginya angka pengangguran itu meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia ini meningkat pesat pula. Pemerintahan memiliki beberapa solusi untuk meminimalisir tingginya angka kemiskinan salah satunya dengan program pemberdayaan masyarakat. Diharapkan dengan adanya program pemberdayaan masyarakat bisa berdaya dan bertanggung jawab atas kesejahteraan hidupnya.

Desa Rancapaku merupakan salah satu desa yang memiliki program pemberdayaan masyarakat. Keadaan desa tersebut masih sedikit tinggi angka pengangguran, masyarakat masih kurang sadar akan pentingnya program pemberdayaan, dan di desa tersebut memiliki potensi lahan untuk dijadikan desa wisata agar sedikit menekan angka pengangguran. Namun kesadaran akan pentingnya pengembangan lahan dan melihat potensi dari sumber daya alam yang ada pada generasi muda masih tergolong rendah. Maka dari itu, melalui program pemberdayaan masyarakat diharapkan generasi muda atau masyarakat sekitar bisa mengelola suatu tempat untuk dijadikan lahan mencari penghasilan serta diharapkan juga dengan pemberdayaan bisa meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat.

Pada gambar dibawah ini mendeskripsikan kerangka konseptual peneliti terhadap penelitian pemberdayaan masyarakat melalui ekowisata Taman Pico dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka terdapat pertanyaan penelitian yaitu: bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekowisata Taman Pico dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat.